PERAN *UN WOMEN* PADA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK SURIAH PADA 2019-2023

Oleh: Aldi Dwi Pusla Wahyudi
Dosen Pembimbing: Dr. Umi Oktyari Retnaningsih, MA
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/ Fax: 0761-63277

ABSTRACT

Women can play important roles in shaping the world, including contributing to the struggle for peace in conflict-affected countries such as Syria. UN Women has been instrumental in empowering women and supporting their participation in peacebuilding. This article discusses in depth the role of this organization in helping Syrian women to create peace.

To address this topic, a qualitative research method was employed, utilizing document analysis techniques with data sourced from the official UN Women website, along with books, international and national journals, and international news outlets. This research also adopts the perspective of Pluralism, using the theory of International Organizations as outlined by Clive Archer.

The research highlights the role of UN Women in three key aspects: first, as an actor supporting the Syrian political process based on UN Security Council Resolutions 1325 and 2254, particularly in promoting women's participation in Syria. Second, as an arena, through the establishment of the Women's Advisory Board (WAB) and its role in advancing women's participation in conflict resolution, serving as one of UN Women's main instruments.

.***Keywords:*** *UN Women, Empowerment, Women's Participation, Syrian Conflict, Conflict Resolution*

PENDAHULUAN

Konflik perang bersenjata yang tiada henti di Suriah telah menyebabkan 11,3 juta orang mengungsi dan merenggut nyawa sekitar 500.000 orang. Meskipun secara luas dianggap sebagai bencana kemanusiaan paling buruk dalam sejarah, konflik Suriah dimulai dengan damai. Pada tahun 2011, demonstrasi tanpa kekerasan meletus di seluruh negeri sebagai bentuk dukungan terhadap protes anti-pemerintah di provinsi Dara'a, dimana kerusuhan sipil yang meluas terjadi setelah penahanan dan penyiksaan terhadap sekelompok anak sekolah. Hal tersebut awalnya dipicu oleh sekelompok anak remaja yang menulis grafiti di tembok sekolah mereka yaitu "Kami menginginkan rezim turun." Aparat keamanan yang melihat grafiti itu kemudian menangkap para remaja itu. Penangkapan ini kemudian mendapat protes dari para orang tua dengan menggelar demonstrasi menuntut pelepasan anak-anak mereka yang ditangkap aparat keamanan. Demontrasi itu kemudian mendapat respons dari masyarakat dan berlanjut dengan ikut andilnya para aparat keamanan yang berupaya membubarkan demonstrasi itu dan memakan korban jiwa, dimana sebanyak 4 orang meninggal di tangan para aparat keamanan. Kemudian demonstrasi meluas dan terjadinya konflik yang berkepanjangan.[1]

Sejak Maret 2011, orang Suriah telah berdemonstrasi menuntut rezim yang sudah berkuasa terlalu lama, yang dimulai dengan Hafied al-Assad pada tahun 1972 dan digantikan oleh anaknya Bashar al-Assad pada tahun 2000 hingga 2011. Gerakan Rakyat Suriah ini merupakan bagian dari gelombang Arab Spring yang mendukung demokrasi di negara-negara Arab. Namun, rezim Assad merespon para demonstran yang sebagian besar berasal dari kalangan Sunni, dibunuh tanpa ampun oleh pemerintah Assad yang berasal dari Syiah Alawy.[2] Akar masalah yang menjadi penyebab konflik di Suriah adalah kepentingan politik dan ekonomi dari warga negara yang menuntut penggantian rezim. Perekonomian dan pembangunan di negara Suriah sendiri tergolong rendah, dikarenakan index HDI (Human Development Index) dari Suriah berada di urutan 111 dari 182 negara. Pada tahun tersebut, tepatnya pada bulan Maret yang beriringan dengan gelombang pemberontakan di negara-negara Arab, para demonstran menuntut terjadinya reformasi, mundurnya Bashar Assad, dibukanya kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan berbicara, dan juga perbaikan ekonomi yang direspon oleh pemerintah Suriah dengan memenuhi sebagian tuntutan rakyat.

Namun dengan adanya upaya negoisasi dari pihak pemerintah, tuntutan penggantian rezim dan pengunduran diri Presiden al-Assad merupakan tuntutan utama para demonstran yang menjadi pintu masuk lahirnya konflik dan perang di Suriah. Ada tiga aktor utama yang terlibat dalam konflik di Suriah, Presiden Bashar al-Assad dan para pendukungnya, oposisi Suriah, dan kelompok kepentingan yang memberikan dampak bagi Suriah

[1] Fahham, A. M. (2014). Mengkaji Konflik Suriah. Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial, 5(1), 85-92

[2] Ibid, 88

dengan jatuhnya korban jiwa dan pengungsian besar-besaran.[3]

Memberdayakan perempuan menjadi salah satu kunci utama dalam membentuk peradaban dan perdamaian di Suriah. Namun, perempuan Suriah tidak boleh hanya dipandang sebagai korban tetapi juga sebagai agen perubahan di kalangan masyarakat. Selama perang terjadi, perempuan di Suriah memberi perhatian lebih dalam melihat situasi dan kondisi di kawasan tersebut apakah perubahan yang berlangsung akan membawa kemajuan jangka panjang pada status sosial perempuan setelah perang berakhir.

UN Women melakukan advokasi bersama perempuan Suriah mengenai peran mereka sebagai pemberi suara perdamaian dan membantu pada membangun kapasitas kepemimpinan mereka, mengumpulkan perempuan dari berbagai latar belakang dan pendapat, dan mendukung mereka dalam proses mengidentifikasi dan menyatukan agenda bersama untuk perdamaian. UN Women berupaya dalam memenuhi kebutuhan perempuan sekaligus mempromosikan kepemimpinan mereka dalam penyelesaian konflik, pembangunan perdamaian, dan pemulihan di kawasan tersebut. UN Women berfungsi dalam memberdayakan perempuan di Suriah dengan tujuan meningkatkan kinerja dan mutu hidup perempuan dalam beragam unsur dan isu di Suriah.

Perempuan di Suriah mampu melawan stigma masyarakat meskipun dengan banyaknya kesenjangan sosial yang datang dari berbagai arah, perempuan mampu memainkan peran dalam upaya mediasi ini, dimana posisi mereka dapat bersifat resmi dan terlihat dalam beberapa kasus, tetapi para peserta mencatat kenyataan bahwa upaya-upaya ini sebagian besar tidak diakui, belum lagi dengan mediator perempuan harus berurusan dengan isu-isu yang berkaitan dengan keamanan pribadi mereka, mengingat tidak adanya mekanisme perlindungan yang dapat diandalkan dan dapat diakses dalam konteks konflik yang sedang berlangsung.

Di negara Suriah, tidak terdapat adanya undang-undang yang membatasi partisipasi perempuan atau anggota minoritas dalam proses politik, dan mereka memang dibolehkan dalam berpartisipasi. Meskipun tidak ada pembatasan secara pasti, hambatan budaya dan sosial sebagian besar mengecualikan perempuan dari posisi pengambilan keputusan atau decision-making.

Belum lagi dengan adanya konsep konflik bersenjata dan praktik peperangan yang keduanya saling berkaitan pada isu gender, dimana suatu konflik yang terjadi dalam sebuah budaya dapat memberikan peran dan nilai yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan, sehingga berdampak pada kehidupan mereka secara berbeda. Lebih jauh lagi, struktur diskriminasi gender dalam suatu masyarakat diperkuat selama masa perang.[4]

Sebenarnya, perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan perdamaian dan

[3] Fahham, A. M., & Kartaatmaja, A. M. (2016). Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, *5*(1).

[4] Alsaba, K., & Kapilashrami, A. (2016). Understanding women's experience of violence and the political economy of gender in conflict: the case of Syria. Reproductive health matters, 24(47), 5-17.

resolusi perdamaian, dimana terdapat studi yang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam negosiasi meningkatkan kemungkinan gencatan senjata menjadi bertahan selama setidaknya 15 tahun sebesar 35%.[5] Selain itu, jika perempuan lokal berpartisipasi dalam negosiasi perdamaian, kemungkinan penghentian kekerasan dalam waktu satu tahun meningkat sebesar 25%.[6] Resolusi 1325 dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan merekomendasikan bahwa setidaknya perwakilan perempuan harus terdiri dari setidaknya 30% peserta perundingan perdamaian. Namun, persentase yang ditetapkan tersebut belum dapat dipertahankan oleh badan tersebut selama proses perdamaian di Suriah.

KERANGKA TEORI

Perspektif: Pluralisme

Pendekatan pada penggunaan penelitian ini menggunakan perspektif Pluralisme, dimana Pluralisme ini mempunyai sudut pandang dimana sistem internasional itu tidak hanya terpaut pada aktor negara atau state actor namun juga aktor non-negara atau non-state actor. Perspektif ini juga bertujuan pada melihat cara pandang isu kalangan internasional, yang dimana hubungan internasional juga memiliki dimensi yang sangat luas jangkauannya dan sangat beragam.

Hubungan antara pluralisme dan peran UN Women dalam pemberdayaan perempuan di Suriah ditandai dengan perlunya pendekatan multi-aktor untuk mengatasi perlakuan penindasan atau kesenjangan terhadap perempuan dan untuk mendorong pemberdayaan perempuan dalam lingkungan sosial dan politik. Perspektif pluralisme menekankan pentingnya mengakui keberagaman dalam upaya pemberdayaan perempuan Suriah, sementara peran UN Women adalah untuk mendukung dan memfasilitasi upaya-upaya tersebut secara inklusif dan berkelanjutan dengan berperan sebagai mediator, penyedia sumber daya, dan advokat untuk memastikan bahwa keberagaman dan perspektif perempuan Suriah diakui dan didukung dalam upaya perdamaian.

Teori: Teori Peran Organisasi Internasional

Organisasi Internasional menurut Clive Archer dapat diartikan sebagai suatu struktur kontinuitas formal yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antar anggota (pemerintah atau non-pemerintah) untuk dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mencapai kepentingan bersama para anggota. Teori Organisasi Internasional dikategorikan menjadi dua, yaitu Inter-Govermental Organization yang merupakan delegasi resmi pemerintah dari suatu negara-negara di dunia, dan Non-Govermental Organization yang merupakan kelompok swasta di bidang kebudayaan, sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan sebagainya. Organisasi Internasional didirikan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama para anggotanya. Tujuan Organisasi Internasional akan tidak tercapai

[5] Barsa, M., Holt-Ivry, O., Muehlenbeck, A., Case, K., Easthom, T., O'Reilly, M., & Federer, J. P. (2016). Inclusive Ceasefires: Women, gender, and a sustainable end to violence. *Inclusive Security*.

[6] Stone, L. (2014). Women transforming conflict: A quantitative analysis of female peacemaking. *Available at SSRN 2485242.*

apabila tidak melaksanakan tugas tujuan tersebut atau memihak kepentingan salah satu anggota dibandingkan yang lain atau menguntungkan satu pihak saja.

Terdapat tiga peran Organisasi Internasional, yang dimana pertama sebagai instrumen dimana peran organisasi dapat digunakan sebagai mencapai suatu tujuan yang bisa dilihat dari sistem IGO yang beranggotakan negara berdaulat. Selanjutnya, merupakan arena, dimana arena disini diartikan sebagai tempat atau wadah untuk berkumpul, berdebat, diskusi dan mengadakan pertemuan dengan tujuan khusus untuk mencapai tujuan organisasi internasional. Peranan yang ketiga adalah aktor, organisasi internasional dalam sistem internasional berperan sebagai aktor independen, dimana ini dimaksudkan dengan segala keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional tidak dapat dicampuri oleh pihak lain atau pihak ketiga. Clive Archer berpendapat bahwa sistem internasional tidak terlalu terstruktur, tidak memiliki badan pusat untuk mengalokasikan nilai dan juga sumber daya sehingga Organisasi Internasional merupakan suatu bentuk kelembagaan antara peserta aktif dalam sistem internasional. [7]

Konsep: Inklusivitas

Dalam penelitian ini akan digunakan konsep inklusivitas, yang mana konsep ini digunakan dalam studi hubungan internasional untuk menjelaskan dan mendeskripsikan keterwakilan gender. Inklusivitas perempuan dalam politik memastikan keterwakilan yang lebih merata, karena perempuan memiliki pengalaman hidup, pola berpikir, dan kepentingan yang berbeda, sehingga kehadiran mereka dalam proses pengambilan keputusan politik akan memperkaya pemahaman dan keberagaman perspektif yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang efektif.[8]

Tingkat Analisa: Kelompok

Penulis menggunakan tingkat analisis kelompok yang dimana berdasarkan pada asumsi bahwa individu melakukan tindakan internasional tergabung pada bentuk kelompok. Adapun terdapat lima level analisis, yaitu level analisis individu, level analisis kelompok, level analisis negara bangsa, level analisis kelompok negara-negara dan sistem internasional.

Mohtar Mas'oed menjelaskan perlunya penerapan level analisis ini dengan tujuan untuk mendapatkan titik suatu fenomena yang diakibatkan oleh lebih dari dua penyebab, sehingga level analisis mampu membantu pada menganalisis faktor mana yang menjadi poin utama pada suatu masalah yang terkait.[9]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Keterlibatan Perempuan Suriah pada *Peacemaking* di Suriah

Dengan adanya para mediator perempuan yang menegosiasikan berbagai macam konflik di tingkat lokal dan nasional, mereka menggunakan beragam bentuk pendekatan guna dalam penyelesaian isu-isu yang berhubungan dengan konflik seperti memediasi isu-isu

[7] Archer, C. (2002). International organisations. Routledge

[8] Aula, M. R. (2023). Isu gender mengenai keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di indonesia. Jurnal Politikom Indonesiana, 8(2), 186-201.

[9] Mas'oed, M. (1994). Ilmu hubungan international: disiplin dan metodologi. Penerbit PT Pustaka LP3ES.

yang berhubungan langsung dengan konflik yang lebih besar, seperti gencatan senjata atau hal-hal yang lebih sensitif lainnya, contohnya dimana perempuan Suriah berupaya dalam menegosiasikan gencatan senjata lokal dan meredakan pertempuran sehingga bantuan dapat masuk. Intervensi yang dilakukan oleh perempuan telah memainkan peran yang dinamis dalam menghubungkan berbagai jalur dalam proses perdamaian.

Di negara Suriah, tidak terdapat adanya undang-undang yang membatasi partisipasi perempuan atau anggota minoritas dalam proses politik, dan mereka memang dibolehkan dalam berpartisipasi. Meskipun tidak ada pembatasan secara pasti, hambatan budaya dan sosial sebagian besar mengecualikan perempuan dari posisi pengambilan keputusan atau decision-making. Belum lagi dengan adanya konsep konflik bersenjata dan praktik peperangan yang keduanya saling berkaitan pada isu gender, dimana suatu konflik yang terjadi dalam sebuah budaya dapat memberikan peran dan nilai yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan, sehingga berdampak pada kehidupan mereka secara berbeda. Lebih jauh lagi, struktur diskriminasi gender dalam suatu masyarakat diperkuat selama masa perang.[10]

Perempuan dapat memainkan peran penting dalam pembangunan perdamaian dan resolusi perdamaian. Studi menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam negosiasi meningkatkan kemungkinan gencatan senjata menjadi bertahan selama setidaknya 15 tahun sebesar 35%.[11] Selain itu, jika perempuan lokal berpartisipasi dalam negosiasi perdamaian, kemungkinan penghentian kekerasan dalam waktu satu tahun meningkat sebesar 25%.[12] Resolusi 1325 dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan merekomendasikan bahwa setidaknya perwakilan perempuan harus terdiri dari setidaknya 30% peserta perundingan perdamaian. Namun, persentase yang ditetapkan tersebut belum dapat dipertahankan oleh badan tersebut selama proses perdamaian di Suriah.

Meskipun adanya tuntutan dalam partisipasi masyarakat sipil perempuan Suriah yang efektif dalam proses perdamaian, hanya sedikit sekali perwakilan simbolis dari pemerintah Suriah dan delegasi oposisi yang hadir dalam proses perdamaian. Selain itu, para perempuan yang ditempatkan di posisi pemerintahan hanya digunakan sebagai menunjukkan bentuk apresiasi, modernisasi dan kemajuan, dan di sisi lain para perempuan Suriah hanya digunakan oleh oposisi untuk menarik perhatian donor internasional.

Hambatan Dalam Merealisasikan Keterlibatan Perempuan Dalam *Peacemaking*

Sebelum adanya organisasi seperti UN Women yang ikut andil

[10] Alsaba, K., & Kapilashrami, A. (2016). Understanding women's experience of violence and the political economy of gender in conflict: the case of Syria. Reproductive health matters, 24(47), 5-17.

[11] Barsa, M., Holt-Ivry, O., Muehlenbeck, A., Case, K., Easthom, T., O'Reilly, M., & Federer, J. P. (2016). Inclusive Ceasefires: Women, gender, and a sustainable end to violence. *Inclusive Security*.

[12] Stone, L. (2014). Women transforming conflict: A quantitative analysis of female peacemaking. *Available at SSRN 2485242.*

dalam membantu perjuangan perempuan dalam perdamaian di negara tersebut, inklusi perempuan dalam forum besar sudah terjadi pada sebelumnya, contohnya pada perundingan Jenewa yang di adakan oleh PBB pada 2014, kelompok oposisi Suriah yaitu Syrian National Coalition memberi tuntutan pada perundingan tersebut yang diwakili oleh perempuan yang bernama Rima Fleihan, dimana dirinya menjelaskan beberapa tuntutan mengenai pemberian izin untuk warga sipil meninggalkan kota Homs, pemberian izin untuk masuknya bala bantuan ke kota-kota di Suriah, dan transisi pemerintahan secara keseluruhan.

Namun pada forum tersebut, pihak dari rezim pemerintahan Bashar hanya memberikan persetujuan pada pemberian izin untuk warganya meninggalkan kota Homs dan masuknya bala bantuan ke kota kota di Suriah. Pihak rezim pemerintahan Bashar al-assad menolak dengan adanya permintaan dari pihak oposisi mengenai transisi pemerintahan dikarenakan pihak rezim mengklaim untuk berfokus pada penyelesaian isu terorisme dan kekerasan yang sedang terjadi seperti contohnya dengan adanya kelompok terorisme ISIS di negara tersebut.[13]

Pihak oposisi juga menunjukkan kurangnya komitmen terhadap kesetaraan gender. Delegasi oposisi telah menyudutkan perempuan dalam proses perdamaian dengan memperlakukan mereka hanya sebagai ahli, bukan termasuk pada delegasi, sehingga mengkotak-kotakan keterampilan mereka dan menghilangkan kesetaraan gender dari diskusi yang tersedia.

Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian dan politik hanya dirujuk sebanyak tiga kali sepanjang tahun 2019. Diskusi yang terjadi di Dewan Keamanan PBB berulang kali menekankan bahwa tanpa perempuan di meja perundingan perdamaian, hak-hak perempuan dan kekerasan terhadap perempuan tidak akan dibahas, dengan demikian melepaskan semua pihak dari kewajiban untuk menegakkan norma-norma hak asasi manusia internasional yang mendasar. Terlepas dari pernyataan publik PBB tentang pentingnya inklusi perempuan, pada tahun 2019 hanya 1% dari diskusi Dewan Keamanan tentang Suriah yang menyertakan referensi tentang partisipasi perempuan.[14]

Dari 45 anggota komite konstitusi yang dinamakan dengan Syrian Constitutional Committee, yang hadir dalam pertemuan di Jenewa pada 24 Agustus 2020, [15] hanya 13 orang yang merupakan perempuan, di mana hanya 7 orang

[13] W. Kunto. Antaranews. (2014) *PBB gagal pecahkan kebuntuan perundingan damai Suriah*, https://www.antaranews.com/berita/416462/pbb-gagal-pecahkan-kebuntuan-perundingan-damai- suriah diakses pada 7 Januari 2025

[14] M. Kristina (2020). *Mapping Women, Peace and Security in the UN Security Council: 2019*. https://www.womenpeacesecurity.org/resource/mapping-women-peace-and-security-in-the-un-security-council-2019/ diakses pada 7 Januari 2025

[15] L. Edith. M (2020). *UN: Committee drafting new Syria constitution meets Aug. 24*, https://www.washingtonpost.com/world/europe/un-committee-drafting-new-syria-constitution-meets-aug-24/2020/08/19/17aa2b9a-e23b-11ea-82d8-5e55d47e90ca_story.html diakses pada 7 Januari 2025

yang mewakili masyarakat sipil, 4 orang mewakili pemerintah Suriah, dan 2 orang mewakili oposisi. Para anggota dari kelompok ini bertanggung jawab pada penyusunan konstitusi baru untuk Suriah, dimana anggota keseluruhan dari kelompok ini terdiri dari 15 anggota yang berasal dari rezim, organisasi non-pemerintah, dan oposisi Suriah.[16]

Media melaporkan bahwa pemerintahan yang dibentuk setelah pemilihan presiden 2021 sebagian besar tidak berubah dalam rentang beberapa tahun terakhir dan hanya menyumbang dengan memasukkan tiga perempuan ke dalam kabinet. Perempuan menyumbang sebesar 13% dari anggota parlemen yang terpilih pada tahun 2020 lalu.[17]

Pada tahun 2022, terdapat 2 perempuan yang menjadi korban, dimana para pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menahan individu secara sewenang-wenang, termasuk aktivis media dan jurnalis di daerah-daerah yang berada di bawah kendali wilayah mereka. Dalam banyak kasus, para tahanan tidak diberi informasi mengenai alasan penangkapan dan hak-hak mereka untuk mendapatkan proses hukum.[18]

Pada tahun 2023, Kelompok peretas pro-pemerintah Syrian Electronic Army (SEA) sering meluncurkan serangan siber untuk melumpuhkan situs web dan memposting pesan-pesan pro-rezim. Selain melakukan peretasan dan pengawasan, SEA dilaporkan menanamkan spyware dan malware lain di aplikasi ponsel untuk menargetkan aktivis hak asasi manusia, anggota oposisi, dan wartawan. Kelompok-kelompok hak asasi manusia setempat menyalahkan personel rezim atas kejadian-kejadian di mana malware menginfeksi komputer para aktivis. Para pengamat menuduh SEA memperlambat akses internet untuk memaksa sensor mandiri terhadap para pengkritik rezim dan mengalihkan lalu lintas email ke server rezim untuk pengawasan. SEA diduga menargetkan perempuan secara online selama tahun tersebut termasuk dengan melakukan penuduhan terhadap perempuan yang berpartisipasi dalam protes anti rezim di Suwayda.[19]

Perjuangan Perempuan Suriah dan Peran UN Women Dalam Pencapaian Perdamaian

Menjadi Aktor Dalam Mendorong Representasi Perempuan Suriah

Organisasi internasional memiliki peran sebagai aktor yang berdiri sendiri dalam sistem internasional, yang berarti mereka dapat mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan tanpa bergantung pada negara-negara

[16] P. Lakhsmi. (2022). *Women and the Syrian Peace Process*. https://peacenews.com/women-syrian-peace-process/. diakses pada 7 Januari 2025.

[17] U.S. Department of State, Syria 2022 Human Rights Report, (2023), Diakses melalui https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/03/415610_SYRIA-2022-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf Pada 5 Januari 2025

[18] Report of the Secretary-General. *Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020), 2533 (2020), 2585 (2021) and 2642 (2022)*. https://docs.un.org/en/S/2022/775. diakses pada 5 Februari 2025

[19] U.S. Department of State, Syria 2023 Human Rights Report. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/528267-SYRIA-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf. diakses pada 5 Februari 2025.

anggotanya. Dalam hal ini, UN Women merupakan salah satu contoh organisasi internasional yang memiliki daya dalam menentukan kebijakan dan aksi, serta mampu mempengaruhi tatanan global, khususnya terkait dengan isu-isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Dengan kekuatannya tersebut, UN Women memainkan peran strategis dalam memajukan inklusifitas gender dalam proses perdamaian global, seperti yang terlihat dalam upaya mendukung perempuan Suriah dalam proses perdamaian di negara tersebut. Melalui kerjasama erat dengan UN Special Envoy for Syria, UN Women memastikan bahwa perspektif perempuan tercermin dalam proses negosiasi dan rekonstruksi pasca konflik di Suriah, yang seringkali didominasi oleh suara laki-laki.

UN Women didirikan oleh negara-negara anggota PBB dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di seluruh dunia. Sebagai instrumen yang dikelola oleh negara-negara anggota PBB, UN Women bekerja untuk memastikan bahwa agenda kesetaraan gender tidak hanya tercapai di tingkat negara tetapi juga dalam kerangka kerja internasional, mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam sistem internasional yang seringkali mengabaikan suara perempuan.

Dalam konteks ini, UN Women tidak hanya berfungsi sebagai agen perubahan yang memperjuangkan hak perempuan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong negara-negara untuk berkomitmen pada perubahan sosial yang inklusif.

Salah satu bagian dari agenda reformasi PBB adalah pembentukan UN Women, yang menggabungkan sumber daya dan mandat untuk memiliki dampak yang lebih besar. Ada empat bagian sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya yang berfokus secara eksklusif pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu Divisi untuk Kemajuan Perempuan (DAW), Lembaga Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan (INSTRAW), Kantor Penasihat Khusus untuk Masalah Gender dan Kemajuan Perempuan (OSAGI), dan Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan (UNIFEM). Sebelumnya, bagian-bagian ini menggabungkan dan membangun pekerjaan penting dalam mengupayakan inklusifitas perempuan.[20]

UN Women berusaha untuk memajukan perdamaian dengan membantu perempuan dari berbagai latar belakang terlibat dalam proses perdamaian, yang mengurangi konflik dan mendorong kondisi damai. UN Women salah satunya bekerja pada bidang mediasi dan pencegahan konflik atau *Mediation and conflict prevention*, pembangunan perdamaian dan pemulihan atau *Peacebuilding* and *recovery*, dan menjaga perdamaian atau *Peacekeeping* untuk mencapai perubahan besar dalam proses perdamaian dan menjamin perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang melanggar hak asasi manusia.

Pada kasus di Suriah, UN Women menerapkan upaya pada

[20] UN Women. About UN Women. https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women, diakses pada 9 Januari 2025

mediasi konflik melalui bekerja sama dengan UN Special Envoy for Syria. Pengiriman terakhir special envoy yang dilakukan oleh pihak PBB dilakukan pada Januari 2019 dengan melantik Geir O. Pedersen sebagai Utusan Khusus PBB untuk Suriah memimpin upaya PBB dalam melanjutkan secara penuh Resolusi Dewan Keamanan 2254. Geir O. Pedersen mengadvokasi diplomasi internasional yang konstruktif dengan mendorong para pemangku kepentingan utama untuk berdiskusi dengan PBB mengenai langkah-langkah konkrit, timbal balik, dan dapat diverifikasi untuk membantu menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, dan memulihkan stabilitas di Suriah.

Membentuk Wadah Dialog untuk Perempuan Suriah

UN Women dapat dipandang sebagai arena yang memfasilitasi interaksi antara berbagai aktor internasional (negara, organisasi internasional, aktor non-pemerintah, dan masyarakat sipil) untuk mencapai tujuan tertentu, yakni peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat global, termasuk dalam konteks perdamaian dan keamanan. UN Women, bersama UN Special Envoy for Syria, mengakui adanya urgensi keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian Suriah yang selama ini terpinggirkan dalam struktur negosiasi yang didominasi laki-laki.

UN Women secara aktif menginisiasi studi dan pengumpulan data untuk menganalisis kebutuhan perempuan serta potensi kontribusi mereka dalam proses perdamaian di Suriah. Dalam langkah strategisnya, organisasi ini menempatkan advokasi inklusivitas gender sebagai prioritas utama dengan menjalin kemitraan erat bersama aktor internasional, termasuk UN Special Envoy.

Tujuannya adalah memastikan bahwa perempuan tidak hanya diakui, tetapi juga memainkan peran signifikan dalam proses negosiasi. UN Women mengambil langkah lebih jauh dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan dan Resolusi 2254 tahun 2015 ke dalam kerangka kebijakan yang relevan. Pada 2016, bersama UN Special Envoy di bawah kepemimpinan Staffan de Mistura, UN Women berperan penting dalam menjadikan inklusivitas gender sebagai pilar utama proses perdamaian. Mereka juga menggagas pembentukan *Women's Advisory Board* (WAB) sebagai instrumen kunci untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di meja negosiasi.

Dewan Penasihat Perempuan Suriah atau *Syrian Woman Advisory Board* (WAB)[21] dibentuk oleh Kantor Utusan Khusus pada bulan Januari 2016 yang bekerja sama dengan UN Women pada masa kepemimpinan Mr. Staffan de Mistura yang awalnya berisikan 12 perwakilan masyarakat sipil independen yang akan berkontribusi pada perundingan perdamaian melalui pembentukan WAB. Hal ini terjadi setelah beberapa

[21] UN Women. (2022), *A group of women has bridged differences towards peace in Syria* https://arabstates.unwomen.org/en/stories/feature-story/2022/11/a-group-of-women-has-bridged-differences-towards-peace-in-syria diakses pada 8 Februari 2024 Pukul 23:43 WIB

tahun upaya dan advokasi yang dilakukan oleh aktivis hak-hak perempuan Suriah untuk berperan langsung dalam perundingan perdamaian.

Dewan Penasihat Perempuan Suriah terdiri dari 12 perempuan Suriah yang bertemu secara terpisah dengan Staffan de Mistura dari delegasi resmi pemerintah dan oposisi, dimana Dewan Penasihat Perempuan Suriah menjadi upaya dalam menyatukan perempuan dari semua pihak dalam konflik untuk mempromosikan perspektif gender yang lebih kuat dalam perundingan, dan dalam beberapa hal juga membuktikan bahwa orang-orang dari latar belakang politik yang sangat berbeda dapat duduk bersama di satu meja.

Ide inti di balik WAB sendiri adalah untuk memastikan perspektif perempuan yang beragam tersebut dan dengan agenda kesetaraan gender dipertimbangkan selama proses politik. Hal ini sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan 1325 pada tahun 2000 terkait resolusi-resolusi Perempuan, Perdamaian dan Keamanan lalu ditambah dengan Resolusi Dewan Keamanan 2254 pada tahun 2015 yang "mendorong partisipasi bermakna perempuan dalam proses politik di Suriah yang difasilitasi PBB."[22]

Implementasi Program untuk Pemberdayaan Perempuan Suriah Melalui Women's Advisory Board

Women's Advisory Board (WAB), sebagai inisiatif yang didirikan oleh UN Women, berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan memastikan inklusivitas dalam proses perdamaian internasional. Dibentuk dalam konteks Proses Jenewa, WAB memberikan wadah formal bagi perempuan Suriah dari berbagai latar belakang sosial, politik, dan budaya untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi perdamaian. Keberadaan WAB bukan hanya sekadar platform konsultatif, tetapi juga alat transformasi yang bertujuan mengubah dinamika negosiasi tradisional yang seringkali didominasi oleh laki-laki.

WAB menjadi peran penting dalam menyampaikan perspektif perempuan secara langsung kepada mediator PBB dan para pemangku kepentingan tingkat tinggi. Ini memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi perempuan, yang sering kali terabaikan dalam pengambilan keputusan, diintegrasikan ke dalam kebijakan dan langkah strategis yang menyangkut proses perdamaian.

WAB tidak hanya menyediakan ruang untuk berbagi pengetahuan tetapi juga memperkuat kompetensi perempuan dalam menangani masalah kompleks yang terkait dengan pembangunan perdamaian. Pendekatan ini menciptakan landasan bagi perempuan untuk tampil sebagai aktor utama dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan, alih-alih hanya menjadi objek perlindungan dalam konflik.

Sebagai instrumen UN Women, WAB tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap

[22] UN Women. (2016), *Statement by UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka onthe establishment of the Syrian Women's Advisory Board to contribute to peace talks* https://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/2/ed-statement-on-syrian-womens-advisory-board diakses pada 11 Februari 2024 Pukul 19:23 WIB

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan tetapi juga menunjukkan bagaimana pendekatan terstruktur dan strategis dapat menjembatani kesenjangan gender dalam proses politik. Dengan mendukung WAB, UN Women berkontribusi pada terciptanya model perdamaian yang inklusif, berkelanjutan, dan adil, di mana perempuan dilibatkan secara penuh dalam setiap tahap perundingan dan implementasi hasilnya.

Adapun pencapaian yang dibentuk oleh WAB selama rentang tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat dengan bagaimana kinerja dan perundingan yang dilakukan.

- Setidaknya, pada rentang waktu 2016 hingga pada tahun 2019, hanya terdapat 13% perempuan yang berpartisipasi dalam kursi pemerintahan di Suriah, mengingat angka tersebut masih minim dari tercapainya angka yang dituju pada resolusi 1325 yang menyatakan perlunya 30% keterwakilan perempuan di semua badan pemerintahan di masa depan di Suriah, termasuk badan-badan transisi. Namun pada tahun 2019, representasi perempuan Suriah mengalami terobosan dengan sebesar 30% perempuan yang ditunjuk menjadi anggota Komite Konstitusi Suriah, sebuah platform utama dari proses politik yang dipimpin oleh Suriah yang difasilitasi oleh PBB. Dengan jumlah perempuan terbesar dalam negosiasi perdamaian di Timur Tengah, partisipasi ini menawarkan peluang bagi perempuan Suriah untuk berkontribusi membawa perdamaian kembali ke negara mereka. WAB berperan dalam membuka jalan ini, dua anggotanya, yaitu Raifa Sami' dan Sabah Hallaq, menjadi bagian dari Komite Konstitusi. Sebagai pejuang keterlibatan masyarakat sipil dalam proses politik, WAB adalah salah satu aktor pertama yang menyerukan delegasi ketiga yang mewakili beragam aktor masyarakat sipil untuk Komite Konstitusi.[23]
- *Women's Advisory Board* membuat *Position Papers*, yaitu dokumen resmi yang disusun oleh *Women's Advisory Board* dalam konteks proses perdamaian, khususnya terkait dengan konflik di Suriah. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pandangan, rekomendasi, dan posisi WAB mengenai isu-isu tertentu yang berkaitan dengan perempuan, perdamaian, dan keamanan. Salah satu *Position Papers* yang dibentuk oleh *Women's Advisory Boar*d yaitu Mutually Agreed Principles atau *Green Principles* pada tahun 2020 yang menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan

[23] UN Women. (2022), *A group of women has bridged differences towards peace in Syria* https://arabstates.unwomen.org/en/stories/feature-story/2022/11/a-group-of-women-has-bridged-differences-towards-peace-in-syria diakses pada 11 Januari 2025

kerangka kerja yang inklusif dan berkelanjutan dalam penyelesaian konflik di Suriah.[24]

- Pada April 2021, *Women's Advisory* Board menyampaikan surat kepada Rosemary DiCarlo, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, yang mendesak kepemimpinan PBB untuk mengambil langkah-langkah konkrit guna menghidupkan kembali proses politik di Suriah. Surat tersebut juga meminta agar WAB diberi kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara langsung.
- Dari Agustus hingga September 2022, WAB mengembangkan empat skenario potensial untuk membuka kembali jalur proses politik, meskipun skenario-skenario tersebut belum diserahkan secara resmi pada waktu laporan dibuat. Selain itu, menjelang setiap pertemuan dengan para pemangku kepentingan tingkat tinggi, WAB secara konsisten menyusun pernyataan yang merangkum area-area konsensus yang telah dicapai oleh anggotanya, menunjukkan pendekatan strategis mereka dalam memengaruhi pengambilan keputusan.[25]
- *Women's Advisory Board* mengadakan delapan pertemuan tatap muka di beberapa lokasi dalam rentang tahun 2021 hingga 2022, seperti di Vaud, Jenewa, di Helsinki, dan di Brussels, dimana pertemuan ini difokuskan pada diskusi strategis mengenai proses perdamaian di Suriah dan dilanjutkan dengan menyelenggarakan empat diskusi meja bundar dengan tema khusus di dalam rentang tahun yang sama. Sebagai pelengkap, satu sesi teknis daring tentang desentralisasi dipimpin oleh akademisi, Dr. Aqil Saeed Mahfoud, untuk memberikan wawasan tambahan. Semua kegiatan ini menunjukkan pendekatan sistematis WAB dalam mengintegrasikan perspektif berbasis pengalaman dan penelitian untuk mendukung proses perdamaian yang inklusif.[26]
- *Women's Advisory Board* juga melakukan upaya diskusi dengan serangakaian aktor lain dalam rangka membahas solusi dalam penyelesaian politik di Suriah. Pada tanggal 8 September 2023, *Mediterranean Women Mediator Network* atau MWMN mengadakan forum

[24] UN Women. *UN Women Syria Programme Phase II Evaluation "Annex Final Report" April 2024* https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrx_4gjR4Jn8gEAnRMj4gt.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1737800740/RO=10/RU=https%3a%2f%2fgate.unwomen.org%2fEvaluationDocument%2fDownload%3fevaluationDocumentID%3d10294/RK=2/RS=KH0HZ_RkRdxJZK95C9LnFvmmEao- (2024) diakses pada 12 Januari 2025

[25] *Ibid*

[26] *Ibid*

diskusi dengan *Women's Advisory Board* yang berfokus pada inklusi dan partisipasi perempuan dalam proses politik di Suriah dan dinamika regional. Forum diskusi ini diadakan MWMN di Roma dengan kolaborasi oleh UN Women dan Utusan Khusus PBB untuk Suriah yang dihadiri oleh delapan perwakilan MWMN dari sejumlah negara seperti Lebanon, Turki, Mesir dan Italia, serta para ahli dari Sekretariat dari MWMN. Rangkaian acara dilakukan dengan MWMN mempromosikan sebuah kegiatan di Istituto Affari Internazionali (IAI) dan diikuti dengan sebuah pertemuan meja bundar tingkat tinggi di Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Italia di mana pada forum meja bundar tersebut membahas sentralitas solusi politik untuk konflik Suriah dalam kerangka Resolusi PBB untuk dapat bisa ditegaskan kembali.[27]

SIMPULAN

Peran yang dimainkan UN Women sebagai aktor kunci dalam pembangunan perdamaian berfokus pada pemberdayaan perempuan dan memastikan bahwa kesetaraan gender menjadi elemen sentral dalam setiap tahap proses perdamaian. Dalam menjalankan perannya, UN Women menyusun kebijakan inklusif, memfasilitasi pertemuan-pertemuan strategis, dan memberikan pelatihan kepada perempuan agar mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dan efektif dalam negosiasi perdamaian.

Adapun dengan adanya kehadiran UN Women dalam pembentukan entitas-entitas yang mendukung untuk para perempuan Suriah dapat memberikan wadah dan kesempatan pada tersampaikannya inklusivitas perspektif perempuan selama proses penyelesaian konflik berlangsung, seperti adanya WAB yang memberi jangkauan yang lebih luas dalam keterlibatan perempuan melalui badan penasihat untuk Utusan Khusus selama negosiasi perdamaian.

Peran yang dimainkan UN Women sebagai instrumen utama dalam pemberdayaan perempuan Suriah dapat dilihat dengan peran strategis melalui pembentukan *Women Advisory Board* (WAB) yang dimana entitas ini dirancang dalam memastikan keterlibatan perempuan pada saat proses perdamaian berlangsung. WAB yang diinisiasi oleh UN Women menjadi alat untuk mewujudkan inklusivitas gender dalam konteks konflik yang didominasi oleh laki-laki. Pada kondisi sebelum kehadiran UN Women, partisipasi perempuan dalam proses penyelesaian konflik di Suriah terkesan minim dan terbatas. Hambatan struktural dan sosial membuat perempuan sulit untuk terlibat secara berarti dalam proses perdamaian, baik di tingkat lokal maupun internasional.

Dapat disimpulkan bahwa Intervensi UN Women menegaskan bahwa keberadaan perempuan bukan hanya relevan tetapi juga esensial dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh

[27] MWMN. "*The MWMN and the Syrian Women Advisory Board (WAB)*" https://womenmediators.net/the-mwmn-and-the-syrian-women-advisory-board-wab/ (2023) diakses pada 12 Januari 2025

keberadaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325: Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (*Women, Peace, and Security*) yang diadopsi pada 13 Oktober 2000. Resolusi ini memberikan kerangka kerja global yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengatasi dampak konflik yang beragam terhadap perempuan, serta menetapkan arah yang jelas untuk melibatkan mereka dalam solusi perdamaian, seperti pada empat pilar utama dari resolusi tersebut dengan perlindungan, partisipasi, pencegahan, pertolongan dan pemulihan. Ditambah dengan Resolusi Dewan Keamanan 2254 pada tahun 2015 yang berisikan tentang "mendorong partisipasi bermakna perempuan dalam proses politik di Suriah yang difasilitasi PBB". Resolusi tersebut menyatakan perlunya 30% keterwakilan perempuan di semua badan pemerintahan di masa depan di Suriah, termasuk badan-badan transisi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Archer, C. International organisations. New York: Routledge. (2002).

Mas'oed, M. Ilmu Hubungan Internasional: disiplin dan metodologi. Bandung: LP3ES. (1990).

Sugiono, M., & Khoiriati, S. D. Pluralitas Teoritis dan Pluralisme dalam Hubungan Internasional

Jurnal:

Aula, M. R. Isu gender mengenai keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di indonesia. Jurnal Politikom Indonesiana, 8(2), 186-201. (2023)

Alamona, J., Zakarias, J. D., & Kawung, E. J. Marginalisasi Gender Dalam Pengambilan Keputusan. (Studi Kualitatif Kaum Perempuan Di Lembaga Legislatif Kota Manado). Journal of Social and Culture Holistik. (2017)

Alsaba, K., & Kapilashrami, A.. Understanding women's experience of violence and the political economy of gender in conflict: the case of Syria. Reproductive health matters, 24(47), 5-17. (2016)

Barsa, M., Holt-Ivry, O., Muehlenbeck, A., Case, K., Easthom, T., O'Reilly, M., & Federer, J. P. (2016). Inclusive Ceasefires: Women, gender, and a sustainable end to violence. Inclusive Security

Fahham, A. M., & Kartaatmaja, A. M. Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 5(1). (2016).

Putri, P. K. Manajemen konflik dan resolusi Konflik: sebuah pendekatan terhadap perdamaian. Papua Journal of Diplomacy and International Relations, 2(1). (2022). 16-34.

Qomariah, D. N. Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah, 4(2). (2019). 52-58.

Setyowati, E. Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah Pbb Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi. Jurnal Artefak, 8(2), 127-136. (2021)

Stone, L. (2014). Women transforming conflict: A quantitative analysis of female peacemaking. Available at SSRN 2485242

Dag Hammarskjold Library, "Gender and The Commission on the Status of Women (CSW): A Quick Guide," https://research.un.org/en/CSW

Dokumen Resmi:

ASEAN. *ASEAN Security Outlook* International Report. " Mid-Term Evaluation of UN Women's Supporting Syrian Women's Engagement in the Syrian Political Process – Building a Homegrown Constituency for Peace Programme https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1SfcRPYJn6AEARHUj4gt.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1737798161/RO=10/RU=https%3a%2f%2fgate.unwomen.org%2fEvaluationDocument%2fDownload%3fevaluationDocumentID%3d9372/RK=2/RS=XiKJYt0cNtPeP012bXnTbwzQdj0- (2019)

U.S. Department of State, Syria 2019 Human Rights Report. Diakses melalui https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/03/SYRIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf (2020)

U.S. Department of State, Syria 2022 Human Rights Report. Diakses melalui https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/03/415610_SYRIA-2022-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf (2023)

U.S. Department of State, Syria 2023 Human Rights Report. Diakses melalui https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/528267-SYRIA-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf (2024)

UN Report of the Secretary-General. Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020), 2533 (2020), 2585 (2021) and 2642 (2022). https://docs.un.org/en/S/2022/775 (2022)

UN Women, "Financial Brochure," https://unwomen.org/sites/default/files/2024-09/UN-Women-financial-brochure-2023-en.pdf

UN Women, "The UN Women Executive Board: An Informal Guide." https://unwomen.org/sites/default/files/2021-1

UN Women. UN Women Syria Programme Phase II Evaluation "Annex Final Report" April 2024 https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrx_4gjR4Jn8gEAnRMj4gt.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1737800740/RO=10/RU=https%3a%2f%2fgate.unwomen.org%2fEvaluationDocument%2fDownload%3fevaluati

onDocumentID%3d10294/RK=2/RS=KH0HZ_RkRdxJZK95C9LnFvmmEao- (2024)

United Nations. Note to Correspondents: Statement of the International Syria Support Group https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2015-11-14/note-correspondents-statement-of-the-international-syria-support-group (2015)

Internet:

BBC. What is the Geneva II conference on Syria?, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-24628442 (2014)

G. Maria. Luisa. PassBlue. "How Syrian Women Landed at the UN Peace Talks and What It All Means". https://www.passblue.com/2016/05/10/how-syrian-women-landed-at-the-un-peace-talks-and-what-it-all-means/ (2016)

L. Edith. M. UN: Committee drafting new Syria constitution meets Aug. 24, https://www.washingtonpost.com/world/europe/un-committee-drafting-new-syria-constitution-meets-aug-24/2020/08/19/17aa2b9a-e23b-11ea-82d8-5e55d47e90ca_story.html (2020)

M. Kristina. Mapping Women, Peace and Security in the UN Security Council: 2019. https://www.womenpeacesecurity.org/resource/mapping-women-peace-and-security-in-the-un-security-council-2019/ (2020)

Medium. “Syrian Women Must Be at the Center of Building a Sustainable Peace in Syria” https://dppa.medium.com/syrian-women-must-be-at-the-center-of-building-a-sustainable-peace-in-syria-99e90627a61e (2020)

MWMN. "The MWMN and the Syrian Women Advisory Board (WAB)" https://womenmediators.net/the-mwmn-and-the-syrian-women-advisory-board-wab/ (2023)

OSAGI. Landmark resolution on Women, Peace and Security, https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/

OSES. Women’s Advisory Board, https://specialenvoysyria.unmissions.org/women%E2%80%99s-advisory-board

Oxfam. ‘Have faith in Syrian women. We can do anything’. " https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/have-faith-syrian-women-we-can-do-anything (2014)

P. Lakhsmi. Women and the Syrian Peace Process. https://peacenews.com/women-syrian-peace-process/ (2022)

Peace Women. SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1889. https://peacewomen.org/SCR-1889

Political and Peacebuilding Affairs. Gender, Women, Peace and Security, https://dppa.un.org/en/women-peace-and-security

The Syrian Women's Political Movement. The Syrian Women's Political Movement's statement on its participation in the Security Council session no. 8805. https://syrianwomenpm.org/events/swpms-participation-in-the-briefing-on-syria-to-the-security-council-with-a-message-presented-by-dr-abeer-al-hussein-on-behalf-of-its-members/ (2021)

UN Women, "Governance," https://www.unwomen.org/en/about-us/governance

UN Women, "Partners." https://www.unwomen.org/en/partnerships

UN Women, "The UN Women Executive Board: An Informal Guide." https://unwomen.org/sites/default/files/2021-1

UN Women, "UN Under-Secretary-General and UN Women Executive Director Sima Bahous" https://www.unwomen.org/en/about-us/directorate/executive-director

UN Women, "Women and the Sustainable Development Goals (SDGs)," https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs

UN Women. "UN Creates New Structure for Empowerment of Women". https://www.unwomen.org/en/news/stories/2010/7/un-creates-new-structure-for-empowerment-of-women

UN Women. A group of women has bridged differences towards peace in Syria https://arabstates.unwomen.org/en/stories/feature-story/2022/11/a-group-of-women-has-bridged-differences-towards-peace-in-syria (2022)

UN Women. About UN Women. https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women

UN Women. Crisis update: Women of Syria, eight years into the crisis https://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/8/feature-syria-humanitarian-update (2018)

UN Women. Statement by UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka on the establishment of the Syrian Women's Advisory Board to contribute to peace talks https://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/2/ed-statement-on-syrian-womens-advisory-board (2016)

UN Women. Supporting Syrian Women's Engagement in the Syrian Political Process: Building a Constituency for Peace https://arabstates.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/syria-wps-programme

United Nations, "About UN Women: Status Of Women." https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women

United Nations. Note to Correspondents: Statement of the International Syria Support Group https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-

correspondents/2015-11-14/note-correspondents-statement-of-the-international-syria-support-group (2015)

UNSCR. Resolution 2254. http://unscr.com/en/resolutions/doc/22547